

C.12

11/11/18

PROSIDING 1 KONGRES KEBUDAYAAN JAWA II

**PENGARUSUTAMAAN
KEBUDAYAAN JAWA
untuk
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT**

Mercure Grand Mirama Surabaya
Jalan Raya Darmo 68-70
Surabaya

21-23 November 2018

Kongres Kebudayaan Jawa II

**Pengarusutamaan Kebudayaan Jawa
untuk Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat**

Mercure Grand Mirama Surabaya
Jalan Raya Darmo 68-70
Surabaya

21-23 November 2018

Kongres Kebudayaan Jawa II

Penyunting:

Setya Yuwana Sudikan

Budinuryanta Yohanes

Endah Imawati

PRAWACANA

Pembincangan ihwal kebudayaan itu kebebasan sekaligus keterpenjaraan. Layaknya obrolan di kedai kopi sambung-menyambung mengalir berpindah dari topik ke topik tidak terasa setakat kantuk yang mengakhirinya. Apapun isi obrolan tentang topik itu amat jarang terjadi kontradiksi hingga memerosok ke perdebatan. Andai berbeda ya berbeda tipis-tipis saja. Itu pun dengan cepat dicapai keselarasan karena pada hakikatnya kebudayaan itu kesemestaan pemikiran.

Akan tetapi, justru oleh sebab kebudayaan sebagai semestaan pemikiran itu keterpenjaraan dapat dialami oleh pembicangnya. Mengapa demikian? Sebagai semestaan pemikiran, kebudayaan melampaui batas pemikiran metafisis sekalipun. Itu sulit. Itu memerlukan keekstrahati-hatian, serta keekstra-energian.

Kongres Kebudayaan Jawa 2 adalah momentum pertemuan pemerhati budaya, ahli budaya, dan pemangku budaya. Semua hadir dengan pemikiran. Dari segi topik amat beraneka, pola pemikiran berbeda, kedalamannya pun tidak sama. Bagai beragam bunga bertumbuh di taman, indah karena kewarna-warnian itu, akan semakin indah jika ditata. Taman itu bernama Mengarusutamaan Kebudayaan Jawa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Sudut-sudut taman itu adalah subtema yang menyimpan berbagai aspirasi. Akhirnya bunga-bunga di setiap sudut itu adalah pemikiran yang tertuang dalam berbagai makalah.

Di prosiding 1 ini terhimpun tulisan dari para pemakalah.

Pemikiran lain akan dihimpun dalam prosiding 2.

Kongres Kebudayaan Jawa II

vi

Pengarusutamaan Kebudayaan Jawa untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Pengantar | v |
| Makalah | |
| Budi Nugroho | 11 |
| <i>Kebudayaan Jawa Sebagai Landasan Sosio-Spiritual dan Kaitannya Terhadap Harkat dan Martabat Manusia</i> | |
| Mulyana | 27 |
| <i>Pulung: Alat Legitimasi Kekuasaan dalam Dunia Perpolitikan Jawa</i> | |
| Dr. Sumbo Tinarbuko | 37 |
| <i>Kebudayaan Jawa: Modal Sosial dalam Komunikasi Publik Era Digital</i> | |
| Budiono Heru Satoto | 51 |
| <i>Perlindungan terhadap Pencipta atas Hasil Karya Ciptaannya</i> | |
| Ki Prijo Mustiko | 63 |
| <i>Trilogi Kepemimpinana dalam Budaya Jawa</i> | |

Pulung: Alat Legitimasi Kekuasaan dalam Dunia Perpolitikan Jawa

Oleh
Mulyana
(mul_mj@yahoo.com)

Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Dalam kultur politik dan kekuasaan Jawa, pulung diyakini sebagai alat legitimasi kekuasaan yang efektif. Sejumlah raja dan penguasa di tanah Jawa memanfaatkan pulung sebagai propoganda politik dan sarana kampanye yang terbukti dibenarkan oleh sebagian besar rakyat. Dari sinilah lahir kultur yang sampai sekarang masih menjadi kepercayaan: siapapun orang yang memperoleh pulung diyakini akan menjadi penguasa atau pemimpin. Sebagai anak kandung budaya Jawa, pulung diyakini orang Jawa sebagai proyeksi dan refleksi daya hidup, sikap mental, dan pengalaman manusia yang paling mendasar berkaitan dengan makna kekuasaan. Pulung adalah sebuah laku dan wahyu sekaligus. Eksistensi pulung yang sudah bersemayam dalam diri seseorang (penguasa) sangat tergantung pada kemampuan lahir batin penguasa tersebut dalam menjaga kesucian laku moralitasnya dan roda pemerintahannya.

Kata kunci: pulung, legitimasi kekuasaan, demokrasi Jawa

1. Pendahuluan

Dalam kultur-politik budaya Jawa, berkembang praktek pencarian legitimasi kekuasaan dengan mengatasnamakan *oleh pulung* 'memperoleh wahyu'. Bagi sebagian masyarakat Jawa, terutama para pengejar kekuasaan, pulung diyakini sebagai wahyu Tuhan yang diberikan kepada seseorang yang terpilih untuk menduduki tahta kerajaan (raja) atau jabatan tertentu. Bahkan, di sebagian wilayah pedesaan Jawa misalnya, seorang balon (bakal calon) kepala desa (lurah) yang paling kuat dan diyakini bakal menang, selain bersandar pada dukun, pawang, *wong pinter*, atau *spiritual advisor* (Sudjarwadi, 1991:211), seringkali tim suksesnya menyebar isu dan gosip politik dengan tujuan mendulang suara pemilih, bahwa kandidat lurah itu rumahnya *wis ketiban pulung* 'rumahnya telah kejatuhan wahyu lurah'.

Masyarakat Jawa masih meyakini, bahwa politik dan kekuasaan berpusat di dalam kraton, maka pulung disebut juga sebagai *ndaruning kraton* atau *wahyu keraton*. Magnis Suseno (1988:107), bahkan dengan jelas menggambarkan, bagi rakyat Jawa, kraton bukan hanya pusat politik dan budaya, keraton juga dianggap sebagai pusat keramat kerajaan. Kraton adalah tempat raja bersemayam, dan rajanya menjadi sumber kekuatan-kekuatan kosmis yang mengalir ke daerah dan membawa ketrentaman, keadilan, dan kesuburan. Paham itu terungkap dengan sangat jelas dalam gelar para penguasa keempat kerajaan di Jawa Tengah hasil perpecahan kerajaan Mataram II ratusan tahun yang lalu. Penguasa di wilayah Yogyakarta menyebut diri *Hamengku Buwana* (yang memangku jagad raya) dan *Paku Alam* (paku dunia). Sementara penguasa Surakarta mengikrarkan dirinya dengan jabatan *Paku Buwana* (paku jagad raya) dan *Mangkunegara* (yang memangku negara) (lihat Suyanto, 1985:2).

Pulung, ndaru atau wahyu kekuasaan (Lihat Purwadi, 2003:127) digambarkan secara simbolis dengan dua perwujudan, yaitu cahaya yang berwarna kebiru-biruan dan seorang ksatria tampan. Orang atau tokoh yang diyakini memperoleh *pulung*, segera akan dilegitimasi dan disosialisasikan oleh para pujangga (pendukung utama pusat kekuasaan) sebagai "calon pemimpin yang diberkati Tuhan". Dalam sugesti dan kampanye yang dilakukan kemudian,

upaya ini pada umumnya berhasil dan sukses menumbuhkan kepercayaan yang mendalam dan hormat rakyat kepada pemimpinnya.

Secara historis-fiktif, raja-raja yang memerintah tanah Jawa adalah keturunan raja-raja yang ada di dunia pewayangan. Dalam lakon “*wahyu Cakraningrat*” misalnya, diceritakan terjadinya perebutan pulung antara putra-putra mahkota (pangeran) yang memang dipersiapkan menduduki jabatan puncak eksekutif (tahta kerajaan). Mereka adalah raden lesmana Mandrakumara (putra mahkota Astina), Raden Samba (putra mahkota Dwarawati), dan Raden Abimanyu (putra Arjuna, calon pemimpin masa depan). Ketiga bacara (bakal calon raja) itu, semuanya melakukan laku dan tapa brata yang sungguh-sungguh agar *wahyu keraton (pulung)* mampir kepada dirinya.

Mula-mula, wahyu Cakraningrat – yang berujud ksatria tampan – masuk ke dalam diri Lesmana, tetapi sebentar kemudian wahyu itu meloncat keluar dan berpindah ke dalam badan Raden Samba. Namun, sama halnya dengan keadaan Lesmana, wahyu tampan itu tidak betah manunggal dengan Samba. Wahyu baru benar-benar berhenti dan menemukan tempatnya ketika masuk ke dalam tubuh sang calon pemimpin sejati, Raden Abimanyu. Sebab utama keluarnya wahyu dari badan Lesmana dan Samba ialah, karena kedua tokoh itu tidak mampu menghadapi godaan jabatan: wanita! Kedua tokoh calon pemimpin itu dianggap gagal dan tidak memenuhi syarat secara moral sebagai pemimpin sejati. Sementara Abimanyu, seorang ksatria tampan, alim, pandai dan sakti, dianggap lulus dan memenuhi syarat baik administratif maupun moral untuk dipilih oleh dewata menjadi raja. Lewat keturunannya, Raden Parikesit, ia menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Meskipun cerita atau konsep terakhir itu dianggap Mulyono (1989:238), sebagai mitos dan suatu anakronisme, namun dampaknya, legitimasi pulung dan kekuasaan menjadi semacam keyakinan politis turun-temurun.

2. Alat Legitimasi Kekuasaan

Pulung dapat diperoleh dengan cara *laku*, yaitu berusaha sekuat tenaga

dengan berbagai cara keprihatinan yang biasanya memerlukan waktu relatif lama. Di samping harus membersihkan jiwa dan mensucikan hati, cara ini membutuhkan banyak pengorbanan: tenaga, harta, bahkan jiwa. Oleh karena itu orang yang berhasil atau sukses mendapatkan pulung dengan cara bersih ini dalam konsep tradisional Jawa disebut sebagai *Sang Wiku Wita Raga*; artinya seseorang yang telah lepas dari hawa nafsu dan keinginan duniawi, termasuk nafsu kekuasaan (Padmospito, 1989:5).

Namun, kadangkala, pulung bisa datang sendiri dan memilih orang yang dikehendaknya. Meskipun orang yang dipilih itu tidak melakukan laku apapun. Tokoh kontroversial Ken Arok misalnya, adalah orang yang dianggap tampil di panggung politik dan kekuasaan dengan cara kedua. Bahkan, banyak pihak menyebut Ken Arok sebagai politikus oportunistis. Pulung yang diperoleh dengan cara pertama, dalam kultur-politik Jawa diyakini lebih terhormat. Di samping menjadi alat legitimasi kekuasaan, wibawa mistisnya akan terus dikenang di hati rakyat. Contoh paling tepat dalam kasus ini adalah tampilnya Sutawijaya menjadi raja pertama Mataram, yang kemudian bergelar: *Panembahan Senapati Sayidin Panatagama Khalifatullah*. Dilihat gelarnya, Sutawijaya memiliki kewenangan yang luas dan luar biasa besarnya; panglima perang (pemimpin tentara), penentu dan penata hukum agama, dan seorang pemimpin yang dianggap wakil Tuhan.

Berdasarkan catatan dalam serat Pararaton dan berbagai versi babad lainnya, raja-raja Jawa berhasil menduduki tahta kekuasaannya karena legitimasi pulung. Ken Arok, Raden Wijaya, Jaka Tingkir (Sultan Hadiwijaya), Sutawijaya (Panembaha Senapati), dan Pangeran Puger (Sunan Paku Buwana I), adalah nama-nama penguasa Jawa yang sukses karena legitimasi pulung. Kalau disimak, ternyata para tokoh sentral itu adalah raja pertama atau tokoh pendiri suatu pusat kekuasaan baru. Artinya, proses awal munculnya raja baru dengan segala kekuasaannya harus dipercayai sebagai "kehendak" Tuhan, yang tentu saja legal dan berwibawa. Meskipun sejarah secara objektif mencatat, para raja pendiri kekuasaan baru, menggenggam kekuasaan lewat kekerasan dan pembangkangan. Sekali lagi, perlu dikemukakan bahwa Ken Arok tampil menjadi raja Singasari setelah ia berhasil melumpuhkan Sang Tunggal Ametung (penguasa legal waktu itu), Jaka Tingkir meraih kekuasaan dengan terlebih dahulu membuat gejolak

politik di keraton Demak, dan Sutawijaya akhirnya juga melawan pemerintahan yang sah di kerajaan Pajang, sebelum akhirnya ia menggeser kekuasaan raja.

Raja atau penguasa yang naik tahta dengan dukungan pulung seolah tidak memberi kesempatan pihak lain untuk mempersoalkan tahtanya, apalagi memberontak. Cahaya pulung yang bersinar di pribadi raja mampu meredam gejala politik, ketidakpuasan rakyat, termasuk kemungkinan terjadinya kerusuhan-kerusuhan politis lainnya. Rakyat Jawa pada umumnya percaya, bahwa rajanya atau pemimpinnya yang “bercahaya” itu pantas *disuyudi*, ditaati, dan dipuja-puja. Keadaan itu menyebabkan raja mampu menggerakkan rakyatnya untuk melakukan pekerjaan kolosal yang luar biasa; misalnya membangun candi, pesanggrahan, atau berperang habis-habisan untuk membela rajanya.

Persoalan “cahaya” dalam perwujudan simbol pulung mendekati kesamaannya dengan konsep Islam tentang *mur*. Dalam Al Quran disebutkan bahwa orang beriman dan mendapat ridha Tuhan akan menampakkan atau memancarkan cahaya kesucian di dahinya, *simaahum fi wujuhihim* (tanda kesucian mereka memancar di wajahnya). Salah satu sebabnya mereka adalah orang-orang yang gemar bersujud (sholat) dan mengasihi sesamanya (Surat Al Fath: 29). Oleh karena itu, ketika Islam mulai masuk dan berpengaruh dalam sejarah dan kehidupan masyarakat Jawa, para raja yang beragama Islam diyakini oleh rakyatnya sebagai pemimpin yang suci, terpilih (*al musthofa*), dan menjadi wakil Allah di muka bumi (*khalifatullah*). Status bernuansa religius itu kemudian diabadikan sebagai gelar kekuasaan raja-raja Jawa, *Sayidin Panatagama Khalifatullah*, sejak Sang Panembahan Senapati sampai kepada seluruh keturunan raja-raja Mataram, baik di Surakarta maupun di Yogyakarta.

Akseptabilitas (keberterimaan) pulung sebagai alat legitimasi kekuasaan harus terus-menerus dipelihara oleh raja yang mendapat wahyu keraton tersebut. Sebabnya, antara lain ialah, agar rakyat atau pihak manapun pelan-pelan bisa melupakan “kudeta politik” yang pernah dilakukannya. Rakyat diharapkan tetap patuh, dan raja selalu dipuja sebagai pemimpin yang tepat, berwibawa dan kharismatik.

3. Pulung dan Praktek Demokrasi Politik Jawa

Sebenarnya, ada sejumlah kemiripan tentang demokrasi dalam konsep politik Jawa dengan konsep demokrasi yang selama ini bergaung di tengah masyarakat dunia. Dalam sebuah Jurnal Politik yang diterbitkan oleh United States Information Agency berjudul "*What is Democracy?*" (1991:4-5) disebutkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih lewat sistem pemilihan langsung dan bebas. Abraham Lincoln pernah mengatakan "demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, padahal keduanya tidak sama. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga menyangkut seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku. Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Oleh karena itu, dalam pemerintahan demokrasi hak individu diatur untuk memperoleh kesamaan hak di depan hukum dan keadilan. Dari sinilah dasar-dasar atau ciri demokrasi berkembang, antara lain (US-IA, 1991:6):

- (1) Kedaulatan rakyat, (kekuasaan sejati ada pada rakyat).
- (2) Pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat (pilihan langsung).
- (3) Kekuasaan mayoritas (tidak memberi ruang bagi kekuasaan individu)
- (4) Hak-hak minoritas (pihak minoritas justru menjadi prioritas)
- (5) Jaminan hak-hak asasi manusia (hukum dan keadilan menjadi pilihan)
- (6) Pemilihan yang bebas dan jujur (demokratis)
- (7) Persamaan di depan hukum (keadilan hukum bagi semua)
- (8) Proses hukum yang wajar dan tidak memihak
- (9) Pembatasan pemerintahan secara konstitusional
- (10) Pluralisme sosial, ekonomi dan politik (saling hormat)
- (11) Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat.

Dalam konsep politik demokrasi Jawa, rakyat juga diyakini sebagai 'jelmaan Tuhan'. Rakyat adalah pemimpin dan pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Sangat mungkin, konsep ini mengadopsi ajaran Islam, tentang makna rakyat. Secara etimologis, kata rakyat berasal dari *ra'in*, artinya pemimpin.

Istilah ini dinukil dari sebuah hadis riwayat Bukhari, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, *kulukum ra'in, wa kulukum masulun 'an ra'iyatihi* (setiap kalian/rakyat adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai tanggungjawabnya atas kepemimpinan itu). Oleh karena itu, jika seorang raja atau penguasa mampu bertindak adil dan bertanggungjawab kepada rakyat, maka dirinya dan kekuasaannya akan mendapat *palilah* atau ridha Tuhan. Penguasa yang mampu mengendalikan diri terhadap wewenang dan kekuasaannya (baca=tidak menyengsarakan rakyat, tidak berorientasi pada kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya), akan membawa ketentraman hidup rakyat. Rakyat akan terus mengengang dan berusaha berinteraksi secara positif dengan pemimpinnya.

Dalam sejarah kekuasaan dan politik Jawa, banyak dijumpai raja yang namanya melekat langgeng di hati rakyat. Dibanggakan dan bahkan dipuja-puja. Orang tentu mengakui bagaimana hebatnya kharisma dan ketokohan Sultan Agung (raja Mataram). Namun, berdasarkan catatan sejarah, raja besar ini pula yang memiliki rekor terbesar mengalami gejolak politik (kerusuhan dan pemberontakan) dari pihak atau lawan-lawan politiknya yang tidak puas atas pemerintahannya.

Raja atau penguasa yang bijaksana dan demokratis, tentu tidak akan terburu-buru menuduh rakyat atau pihak manapun sebagai pemberontak. Boleh jadi, kerusuhan atau pembangkangan terjadi karena kesalahan penguasa sendiri. misalnya, tidak memberikan hak-hak rakyat secara adil, lupa makna kekuasaan (ia mengira bahwa dirinya adalah tuan, dan rakyat adalah pelayannya), dan bertindak keluar dari jalur demokrasi. Sebenarnya, dalam susastra Jawa, banyak ditemukan piwulang tentang bagaimana cara mengatur negara dan rakyat. Dalam Serat Rama, pupuh V, Mijil, bait 1, karangan Yosodipuro I dan II (Darusuprpto, 1977:2), Prabu Rama berpesan kepada adiknya, Barata yang siap naik tahta:

*Lamun sira madeg narapati
Yayi wekas ingong
apan ana ing prabu ugere
Sastra cetha ulatana nuli
omahna den pasthi
wulanging sastreku*

'pesanku wahai adinda
bila engkau menjadi raja
perhatikan pedoman pemerintahan negara
yang bernama *Sastra Cetha*
camkan baik-baik
ajaran ilmu itu'.

Pokok-pokok ajaran pemerintahan yang demokratis dalam ajaran tersebut antara lain memuat:

- (1) Cara mengemudikan pemerintahan negara (undang-undang)
- (2) Pemeliharaan tentara dan pejabat negara (manajemen negara)
- (3) Pembagian tugas-tugas negara (departemen)
- (4) Perlindungan dan kesejahteraan rakyat (keadilan sosial)
- (5) Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa (negara religius)

Melihat isi atau pokok-pokok ajaran pengaturan pemerintahan yang demikian, sebenarnya konsep demokrasi dan manajemen pemerintahan sudah dikenal oleh para penguasa di Jawa ratusan tahun lalu. Namun, praktek pengaturan dan tata pemerintahan banyak yang belum berorientasi pada sendi-sendiri demokrasi. Salah satu contoh, kedudukan raja atau penguasa Jawa pada umumnya diperoleh lewat garis keturunan.

Raja atau penguasa yang demokratis, pada umumnya akan memberdayakan rakyatnya dalam pembangunan kehidupan politik. Tujuan akhirnya adalah menciptakan keadilan dan kedamaian yang seimbang dan harmonis. Saling menjaga kepentingan masing-masing, dan bersama-sama berbuat baik untuk *memayu hayuning bawana*, menjaga agar pulung tetap langgeng bersemayam dalam diri pemimpin dan negara.

4. Keluarnya Pulung dan Hilangnya Kekuasaan

Sebagaimana diuraikan di depan, pulung bagi penguasa Jawa adalah

legitimasi kekuasaan. Pengaruhnya yang teramat besar dalam peta kehidupan politik, terutama terhadap rakyat, menyebabkan sang penguasa mati-matian menjaga agar pulung tidak *oncat* 'keluar' dari pribadi pemimpin. Keadaan ini kemudian membelokkan makna pulung dari 'amanat Tuhan dan rakyat' menjadi 'kekuasaan' atau 'jabatan'.

Dampak negatif dari pergeseran pemaknaan tersebut ialah, munculnya ketakutan sang pemimpin bila pulung meninggalkannya. Sebab godaan terbesar dari sebuah kekuasaan adalah keengganan melepas atau berpisah dengan jabatannya. Sebut saja umumnya para pejabat Indonesia yang seharusnya sudah turun (*lengser*) karena "batal" kepemimpinannya atau pensiun, masih merasa berat melepaskannya. Ekses negatif lain yang tidak kalah serunya ialah, para pejabat yang ketakutan ditinggalkan pulung, akan berusaha sekuat tenaga menjaga dan berbuat apa saja demi kelanggengan kekuasaannya.

Ketika rezim Orde Baru berkuasa, banyak orang mengira bahwa Soeharto adalah pemimpin sejati yang muncul karena legitimasi pulung dan wahyu keraton (kepemimpinan). Berkali-kali pertunjukan wayang kulit digelar pada masa itu untuk mensosialisasikan, mengesahkan dan melegitimasi hal itu. Namun, sang penguasa tampaknya tidak menyadari, bahwa tanda-tanda keluarnya pulung sudah di depan mata. Ketika suara mayoritas rakyat (yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, dan rakyat) yang menyerukan pengunduran dirinya tidak didengar, maka terjadilah klimaks *oncatnya* pulung dari genggamannya. Hilangnya kesadaran, bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan sejati, menjadi bukti bahwa telah terjadi penyimpangan demokrasi. Sejarah kembali mencatat, rezim Orba yang lahir atas sumbangan dan dukungan penuh gerakan mahasiswa 66, akhirnya justru berakhir tumbang dengan tragis oleh anak kandungnya sendiri: mahasiswa 98 (Budiyarso, 2000:ix).

Lalu, kemana perginya pulung kekuasaan? Pertanyaan kontemplatif ini kiranya menjadi pelajaran inti makna demokrasi dalam kehidupan politik di Indonesia pada masa depan. Kekuasaan adalah amanat rakyat. Orang yang menyadari makna ini akan mampu menjadi pemimpin yang demokratis.

5. Penutup

Akseptabilitas pulung sebagai alat legitimasi kekuasaan sangat bergantung pada sikap dan perilaku penguasa dalam mengatur pemerintahannya. Orang Jawa meyakini, bahwa penguasa yang tidak mampu “memelihara” pulung – sebagaimana dialami Raden Lesmana dan Raden Samba – maka dengan sendirinya pulung itu akan keluar dari dirinya. Itu artinya, penguasa tersebut akan segera ditinggalkan rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Budiyarso, Edy. 2000. *Menentang Tirani*. Jakarta: Gramedia.

Darusuprpto. 1977. *Sastracetha*. Buletin Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM.

Mulyana, 1999. “Praktek Demokrasi dalam Politik Jawa”, dalam *Bernas*, edisi 8 April.

_____. 1999. *Fungsi Kultural Ungkapan Tradisional dalam Bahasa Jawa*. Makalah Pascasarjana UGM.

Mulyono, Sri. 1989. *Wayang Asal usul dan Masa Depan*. Jakarta: Haji Masagung.

Padmopuspito, Asia. 1989. "Tapa dan Ruwat dalam Tradisi Sastra", makalah Seminar FPBS IKIP Yogyakarta.

Purwadi. 2003. Kamus Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Dafina.

Sudjarwadi, I.C. 1991. "Bahasa Jawa dalam Pedukunan", dalam *Proseding KBJ I*. Semarang: Harapan Massa.

Suseno, Franz Magnis. 1988. *Etika Jawa*. Jakarta: Gramedia.

Suyanto, Sunar Tri. 1985. *Sejarah Berdirinya Kerajaan Surakarta Hadiningrat*. Surakarta: Tiga Serangkai.

United States Information Agency, 1991. *What Is Democracy?*. USA:US-IA.

